

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah

Indeks Harga Konsumen (IHK) di Maluku mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm) pada Januari 2025, tidak sedalam deflasi pada periode Desember 2024 yang tercatat sebesar 0,41% (mtm). Capaian inflasi ini menurun signifikan dibandingkan historisnya selama tiga tahun terakhir yang mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm). Deflasi Januari 2025 dipengaruhi oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar utamanya bersumber dari komoditas tarif listrik dikarenakan adanya kebijakan stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik. Di sisi lain, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi yang bersumber dari kenaikan harga pada beberapa komoditas ikan pelagis seperti ikan selar, layang, tongkol serta komoditas aneka cabai yang disebabkan oleh faktor curah hujan yang tinggi sehingga mempengaruhi kondisi pasokan. Secara spasial, perkembangan realisasi deflasi Provinsi Maluku didorong oleh deflasi pada 2 (dua) Kota IHK yaitu Kota Tual sebesar 1,47% (mtm) diikuti oleh Kota Ambon sebesar 0,76% (mtm). Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di Kabupaten Maluku Tengah yang mencapai 0,46% (mtm).

Pada Februari 2025, Maluku mengalami deflasi sebesar 0,63% (mtm) lebih dalam dibandingkan realisasi periode Januari 2025. Deflasi bulan ini utamanya didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar dengan andil deflasi (mtm) sebesar 0,75%. Terjadinya deflasi pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh implementasi paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200VA ke bawah. Selain itu penurunan harga pada berbagai komoditas pangan turut serta mendukung deflasi pada bulan ini. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah dipengaruhi oleh terjaganya pasokan komoditas hortikultura di tengah berlangsungnya periode panen komoditas hortikultura di Kota Ambon, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan harga pada komoditas ikan pelagis utamanya ikan tongkol, ikan layang dan ikan cakalang dengan andil inflasi mtm masing-masing sebesar 0,12%, 0,11%, 0,10% seiring dengan peningkatan tinggi gelombang dan penurunan produksi perikanan secara seasonal.

Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,72% (mtm) pada Maret 2025, meningkat dibandingkan realisasi periode Februari 2025 yang tercatat sebesar -0,63% (mtm). Inflasi pada Maret 2025 didorong oleh realisasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar dengan andil inflasi (mtm) sebesar 1,18%. Terjadinya inflasi pada kelompok tersebut dipengaruhi oleh potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2200VA kebawah sehingga memberikan *bounceback* terhadap capaian inflasi pada kelompok tersebut. Selain itu, peningkatan harga juga terjadi pada beberapa komoditas pangan antara lain ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, ikan cakalang, dan cabai rawit seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah terdapatnya peningkatan tinggi gelombang di bulan Maret dan siklus peningkatan curah hujan menjelang triwulan II pada beberapa daerah sentra perikanan Maluku (Kab. Maluku tengah, Kota Ambon dan Kab Kepulauan Aru). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas tarif angkutan udara seiring dengan implementasi diskon tarif angkutan udara pada momen HBKN Ramadhan Idul Fitri serta penurunan harga pada komoditas hortikultura di tengah pasokan yang terjaga.

2. Perkembangan harga barang

Sepanjang periode Januari-Maret 2025, beberapa komoditas pangan mengalami fluktuasi harga namun yang paling menonjol selama triwulan I Tahun 2025 yaitu komoditas cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Pada periode Januari harga Cabai masih tinggi yang berada pada kisaran harga Rp.90.000an kemudian mengalami penurunan pada Februari. Memasuki bulan Maret, harga cabai kembali mengalami kenaikan yang signifikan akibat tingginya permintaan selama Bulan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1446 H. Selain itu, hasil panen cabai di daerah sentra Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Februari didistribusi ke luar daerah sehingga kebutuhan cabai dalam Provinsi Maluku tidak tercukupi. Hal ini sangat berdampak pada lonjakan harga cabai di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan Kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku.

3. Resiko ke depan

Resiko meningkatnya inflasi pada triwulan II 2025 disebabkan oleh masih adanya momen HBKN pada minggu pertama April 2025 dan ditengah masuknya momen kegiatan keagamaan Sidi dan Paskah yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan komoditas pangan seiring dengan adanya pelaksanaan berbagai kegiatan seremoni keagamaan. Selain itu, tren peningkatan harga emas dan harga minyak dunia serta penurunan produksi komoditas hortikultura dan perikanan mengikuti pola *seasonal* musim penghujan di Maluku juga berpotensi mendorong inflasi pada triwulan II 2025.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan I tahun 2025 permasalahan pengendalian inflasi yang terjadi di Provinsi Maluku antara lain:

1. Kenaikan Harga Komoditi

Peningkatan harga pada kelompok ikan pelagis yaitu ikan selar, ikan layang, ikan tongkol dan ikan cakalang. Peningkatan harga pada komoditas perikanan sejalan dengan meningkatnya *demand* di tengah adanya kondisi cuaca yang kurang kondusif di beberapa wilayah sentra produksi perikanan sehingga menghambat aktifitas nelayan untuk melaut. Selain itu, Komoditas aneka cabai meliputi cabai rawit dan cabai merah mengalami kenaikan harga yang signifikan di beberapa Kab/Kota (Kabupaten Aru, Kota Ambon dan Kota Tual).

2. Ketergantungan Distribusi

Sebagai wilayah kepulauan, Maluku menghadapi kendala logistik yang mempengaruhi distribusi barang. Biaya transportasi yang tinggi dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal.

3. Kelangkaan minyak tanah di beberapa wilayah (Kab SBB dan Kab SBT)

Kuota minyak tanah yang ditetapkan kepada Provinsi Maluku tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tingginya penggunaan minyak tanah bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga dipergunakan untuk keperluan kapal nelayan dan transportasi antar pulau.

4. Harga dan Takaran Minyak yang tidak sesuai

Harga jual Minyak kita ditemukan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah yaitu Rp.15.700/ltr dengan harga jual di Maluku mencapai Rp.18.000-Rp.20.000. Selain itu takaran Minyak kita yang beredar di pasaran juga kurang dan tidak sesuai dengan takaran pada kemasan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

K1 : Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang bekerja sama dengan Kanwil BULOG Maluku, BUMN, Distributor dan Ritel Modern yang dibuka oleh Gubernur Maluku dengan harga barang kebutuhan dibawah harga pasar;
- Penjualan Ikan Cakalang sebanyak 900 kg dengan harga Rp.10.000/ekor pada GPM Ramadhan dan Idul Fitri
- Subsidi Harga pada Pasar Pengendalian Inflasi (Pasadli);
- Bersama Satgas Pangan setiap minggu melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar tradisional dan ritel modern.

K2 : Ketersediaan Pasokan

- Pembagian ± 14.000 anakan Cabai Rawit pada Organisasi Masyarakat pada 17 Januari 2025 pada GEREJA KATOLIK (PAROKI HALONG) sebanyak 1000 anakan Cabai Rawit, Klasis Pulau Ambon sebanyak 1500 anakan cabai rawit, AMGPM Ranting Theophani sebanyak 400 anakan Cabai Rawit dan Jemaat Passo Anugerah sebanyak 400 anakan cabai rawit.
- Pembagian Anakan Cabai Rawit di Rutan Ambon pada 27 Februari 2025
- Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Forkopimda melaksanakan pemantauan di Gudang-gudang Bulog dan Distributor.

K3 : Kelancaran Distribusi

- Kerjasama dengan PT ASDP dalam rangka mengutamakan kendaraan pengangkut bahan pangan antar pulau;
- Kerjasama dengan PT Pelindo untuk prioritas bongkar muat bahan pangan;
- Pelaksanaan Mudik Gratis;
- Monitoring ketersediaan Angkutan Umum untuk orang dan Barang pada HBKN Idul Fitri.

K4 : Komunikasi yang efektif

- Rapat Koordinasi Mingguan Pengendalian Inflasi bersama TPIP dilanjutkan dengan Rapat Internal TPID Maluku setiap hari senin;
- Koordinasi intensif dengan TPID Kab/Kota terkait data stok dan perkembangan harga;
- *High Level Meeting* (HLM) TPID Provinsi Maluku dan TPID Kabupaten/Kota terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri
- Koordinasi intensif dan Pemantauan Harga Pangan dan Barang Penting pada 11 Kab/Kota se-Maluku
- Melakukan himbauan kepada masyarakat melalui Media Digital untuk belanja bijak dan tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok
- Pelaporan Neraca Pangan strategis

Mengeluarkan Surat Edaran terkait Upaya Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi TPID Provinsi Maluku pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut.

- Mengoptimalkan intervensi pasar melalui operasi pasar murah /gerakan pangan murah/ program stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Strategi 4K untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan dengan melibatkan berbagai stakeholders
- Pemantauan harga bersama Satgas Pangan dan Aparat Penegak Hukum terutama Minyak Tanah menjadi atensi.
- Memprioritaskan bongkar muat barang kebutuhan pokok dan mengutamakan kendaraan yang mengangkut komoditas pangan di pelabuhan penyebrangan antar pulau, khususnya Feri rute Galala-Buru;
- TPID se-Maluku belum menyusun Road Map TPID Tahun 2025-2027 untuk menjadi patokan dalam pengendalian inflasi kedepan;
- Sinergitas serta komunikasi efektif perlu dijaga dan dilakukan dalam mengantisipasi persoalan pengendalian inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi sepanjang Triwulan I Tahun 2025, maka direkomendasikan kebijakan pengendalian inflasi antara lain :

- Pemantauan harga dan kondisi stok dengan aparat penegak hukum;
- Penyusunan Road Map TPID Tahun 2025-2027.